

Sudah 11 Tahun Kabupaten Batubara

Oleh Dr Erwan Efendi, S.Sos, MA

Momentum Pilkada 2018 merupakan kesempatan terbaik secara politik bagi masyarakat Batubara untuk menentukan pilihan siapa sosok bupati yang layak memimpin Batubara lima tahun ke depan

Batubara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada 15 Juni 2007, bersamaan dilantikannya Penjabat Bupati Batubara, Drs H. Sofyan Nasution. SH dilanjutkan oleh Syaiful Syafri Sipahutar dan terpilihnya bupati definitif OK Arya Zulkarnain, SH, MM melalui jalur independen (2008-2013 dan 2013-2018).

Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh. Kabupaten Batubara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan dalam kurun tahun 2006. Etnis Melayu adalah penduduk asli Batubara, kemudian disusul Jawa, dan Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim di sini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan *Pujakesuma* (Putra Jawa Kelahiran Sumatera) mencapai 43 persen dari keseluruhan penduduk Batubara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Daerah dengan luas 904,96km² dengan total penduduk 382.474 jiwa ini termasuk subur karena mempunyai potensi sumber daya manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup seperti laut (sektor perikanan) dan daratan (ikan air tawar, pertanian tanaman pangan, perkebunan, tambang dll). Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015, persentase agama penduduk Kabupaten Batubara, agama: Islam 87,40, Kristen Protestan 9,94, Katolik 2,33 Buddha 0,32 dan Hindu 0,02.

Sejak abad ke-18, Batubara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas Selat Melaka. Mereka membawa hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura. Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batubara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir Timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Bogak, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama *luhak* di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.

Kabupaten Batubara yang berbatasan sebelah Utara dengan Bandar Khalifah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka. Sebelah Selatan dengan Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang

(Kabupaten Semalungun). Sebelah Barat dengan Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masim, Dolok Batunagar (Kabupaten Semalungun). Sebelah Timur dengan Air Joman (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka, mekarkan pemekaran dari Kabupaten Asahan ke tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batubara. Pada masa pemerintahan peninjauan Hindia Belanda Kabupaten Batubara termasuk dalam keresidenan Sumatera Timur.

Berbeda dengan pemekaran kabupaten lain di Sumatera Utara bahkan di Indonesia. Pembentukan Kabupaten Batubara sebagai pase kedua akhir tahun 2000-an dari Kabupaten Asahan mengorbankan material, tetesan air mata dan darah. Kerlibatan masyarakat bukan hanya di Batubara tapi juga di perantaraan seperti Medan dan Jakarta. Gerakan perjuangan pemekaran semakin luas dan terkoordinasi salah terbentuknya Badan Perjuangan Priapan Pembentukan Kabupaten Batubara (BP3KB) buah dari pertemuan tokoh masyarakat Batubara di rumah makan Mayu milik Husen Al Mahali di Jalan AR Haim Medan. Sahari Zakaria, SH (alm) diangkat sebagai ketua dan Drs. Khairul Maim sebagai sekretaris. Kemudian dalam mayawarah besar BP3KB dengan Gemek di Tomang Elok, di Jalan Medan Binjai, dan Akat H. Andjar Amri, SH sebagai ketua dan Erwan Efendi sekretaris BP3KB. Kabinet sempat berangkat ke DPR RI menerangkan anggota DPR RI (bidang pemerintahan) dan mengundangnya ke Batubara. Kemudian dalam pertemuan di Kampus Amir Hinzah Medan, ditunjuklah OK Arya Zulkarnain sebagai ketua dan Khairul Muslim sebagai sekretaris BP3KB.

Harus kita mengakui sesungguhnya OK Arya termasuk orang terbaik berada di balik perjuangan itu terutama untuk modal pergerakan. Selain memiliki modal, semua perjalanan sosialisasi tentang pemekaran, sosok OK Arya mampu mengangkitkan isu yang sangat menyentuh hati dan kepentingan masyarakat yang mendasar, sehingga menimbulkan simpati dan empati warga. Karena alasan itu pula, tidak ada yang bisa menafikan bahwa OK Arya adalah sosok pejuang pemekaran Kabupaten Batubara. Justu wajar dan pantas kalau OK Arya mendapat dukungan besar masyarakat untuk memimpin Batubara.

Dua periode masyarakat telah membebankan amanah kepada OK Arya menjadi bupati Kabupaten Batubara, dengan harapan dan penuh harap bahwa kondisi Batubara dan nasib masyarakatnya yang

selama ini tertinggal jauh dibanding daerah lain bisa berubah menjadi terbaik. Cukup banyak pula harapan masyarakat kepada OK Arya sebagai pejuang pemekaran untuk memperbaiki keadaan mereka yang sepanjang tahun diselimuti kesulitan. Masyarakat yakin kalau seorang pejuang seperti OK Arya menjadi orang pertama di pemerintahan kabupaten Batubara, kebijakan yang dijalankan pastilah mengutamakan kepentingan orang banyak bukan pribadi dan kelompoknya. Prioritas pembangunan seperti perbaikan infrastruktur haruslah menjadi pilihan utama mengingat banyak jalan yang rusak.

Sektor pendidikan merupakan pilihan utama yang harus dilakukan pengembangannya dalam upaya meningkatkan SDM. Akan tetapi, "sudah 11 tahun Kabupaten Batubara", satu sekolah tinggi pun belum berdiri. Padahal institusi pendidikan tinggi sudah terasa sangat mendesak kehadirannya di bumi Batubara mengingat semakin banyaknya lulusan SMA dan sederajat setiap tahun. Ketika para lulusan itu ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mereka harus pergi ke luar Batubara, paling dekat ke Kisaran (Asahan) atau Tebing Tinggi. Jika saja Pemkab Batubara cerdas dan berinisiatif membangun sebuah perguruan tinggi, tentulah putra-putra terbaik Batubara akan memilih kuliah di daerahnya sendiri daripada harus ke luar daerah. Pertimbangannya sangat sederhana, secara ekonomi biaya kuliah di daerah sendiri tentu jauh lebih murah dibanding dengan luar daerah.

Sedih rasa hati ini jika dibanding daerah lain. Hampir semua kabupaten/kota di Sumatera Utara sudah berdiri perguruan tingginya kecuali Batubara. Hal itu karena penguasanya cerdas dan berpikir tidak ada alternatif lain melakukan perubahan kecuali harus dengan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan ilmu harus mendirikan lembaga pendidikan. Mengingat tingginya desakan masyarakat agar di Batubara berdiri satu perguruan tinggi, Drs Supri Basrah, MAP putra Batubara mengkhilaskan dirinya berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Medan dan pindah ke Batubara mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Batubara di Simpang Dolok. Kini sekolah yang dikelolanya dengan beban yang cukup berat itu sudah beroperasi satu semester. Masyarakat Batubara bangga dan bahagia karena ada putra terbaik menginfakan pemikirannya membangun SDM masyarakat Batubara. Kita berharap muncul lagi "Supri-Supri" lain membangun lembaga pendidikan di daerah bertuah ini.

Paling memalukan dan memalukan bila dibanding dengan daerah pemekaran lainnya khusus di Sumatera Utara, hanya Kabupaten Batubara belum terbangun kantor bupatinya dalam rentang waktu 11 tahun. Padahal sebagai pusat pemerintahan, pengelola roda pemerintahan dan administrasi bahkan sebagai ikon, prioritas utama ketika terbentuknya sebuah daerah adalah membangun kantor. Sulit memahaminya bagaimana cara dan jalan pikiran pe-

ngusa di Batubara selama 11 tahun, sehingga belum berdirinya sebuah kantor kebanggaan masyarakat. Melihat itu, tokoh masyarakat agar Istana Niat Lima Laras segera dibenahi dan dijadikan kantor bupati. Apalagi secara historis, budaya dan arsitek, istana yang dibangun oleh Datok Madyuda itu layak dan pantas menjadi pusat pemerintahan Batubara.

Harapan lain masyarakat kepada OK Arya adalah membuka lapangan kerja. Memang, jika diperhatikan perubahan industri di Batubara cukup signifikan. Namun yang menjadi tenaga kerja bukanlah putra-putra Batubara, walaupun ada jumlahnya sangat terbatas. Putra Batubara banyak menjadi penonton di tanah kelahirannya. Jika *skill* yang diperlukan belum sesuai keinginan perusahaan, hal itu merupakan kewajiban Pemda menyelarasakannya melalui pendidikan yang dikelolanya. Pemda harusnya membangun satu nota kesepahaman bahwa setiap perusahaan di Batubara harus menerima putra daerah sebagai tenaga kerja minimal 75 persen.

Belum ada pembangunan yang bisa menjadi monumental selama 11 tahun Batubara. Sedihnya baru tiga tahun lebih pada periode kedua menjadi bupati, OK Arya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada 13 September 2017. Kini OK Arya sedang menjalani proses pemeriksaan KPK dengan berbagai tuduhan. Jika kasus dilanjutkan ke pengadilan, akan ada putusan hakim yakni bebas atau dihukum. Jika bebas, berarti tuduhan KPK tidak benar dan dia benar adalah pejuang. Tetapi bila terbukti bersalah maka OK Arya akan menjalani hukuman dan kita khawatir akan lahir ucapan dari kalangan masyarakat menyebutnya OK Arya mengkhianati amanah yang telah diberikan masyarakat.

Penutup
Pertengahan 2018, Batubara akan melakukan perhelatan demokrasi yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada). Momentum ini merupakan kesempatan terbaik secara politik bagi masyarakat Batubara untuk menentukan pilihan siapa sosok bupati yang layak memimpin Batubara lima tahun ke depan. Kita tidak ingin terulang kondisi pahit masa lalu, dan oleh karena masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan.

Penentuan pilihan tidak hanya pada intelektual dan kecerdasan dan lain-lain. Tapi yang paling urgen masyarakat harus mengetahui *nasab* (keturunan) para calon, seperti di mana dia lahir, siapa orangtuanya, bagaimana status perkawinannya, bagaimana ahlaknya, ketaatannya dan lain-lain. Jika nasabnya tidak jelas, pemilih harus meninggalkannya. Saran penulis, untuk lebih aman menjatuhkan pilihan kepada orang yang dekat atau paling kita kenal, karena kita pasti tahu dan jelas tentang nasabnya. Semoga.

Penulis adalah Wartawan Waspada.

18/19
18/2017

